



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1999 Nomor 52, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan pungutan atas setiap pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dengan nama retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengobatan umum;
 - b. tindakan kesehatan umum;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. tindakan kesehatan gigi dan mulut;
 - e. kesehatan lain-lain.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa.
- (2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis dan non medis.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana.

BAB VII
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Bagi Penduduk Daerah yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli, mendapat pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi tindakan.
- (3) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi tindakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang dipersamakan, dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya dilakukan di Puskesmas;
 - b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dikembalikan sebesar 100% (seratus per seratus) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan.
- (2) Pengelolaan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 - b. jasa sarana puskesmas sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
 1. untuk operasional Puskesmas sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 2. untuk peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan Peningkatan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dikelola Puskesmas sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 24

Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan (1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, (2) Pengendalian biaya kesehatan yang terjangkau, (3) pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat untuk hidup sehat. Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan meningkat biaya operasional Puskesmas, maka dilakukan analisis biaya pelayanan di Puskesmas agar berbasis Real (Unit Cost).

Sehubungan dengan hal tersebut dan bertambahnya jenis pelayanan serta fasilitas baru pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan diatas *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas* perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut diatas untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Pendaftaran adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan tanpa tindakan.
- huruf b : *Pelayanan tindakan kesehatan umum* adalah pelayanan tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan yang meliputi ; Pelayanan klinik umum, pelayanan bedah, pelayanan penyakit mata, pelayanan penyakit telinga hidung tenggorokan (THT), pelayanan klinik IMS dan Napza, Laboratorium, radiologi, Elektromedik.
- huruf c : Pelayanan Kesehatan ibu dan anak adalah pelayanan tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan yang meliputi ; rawat jalan pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan rawat inap.
- huruf d : Pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan pasien yang menderita sakit gigi dan keluhan rongga mulut lainnya yang meliputi tindakan preventif, tindakan pencabutan, tindakan bedah mulut sederhana dan tindakan bongkar protesa.

- huruf e : Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang meliputi : Pelayanan perawatan rumah, keur dokter, pemeriksaan buta warna, visum, konsultasi kesehatan lainnya, konsultasi dokter umum/ dokter gigi, konsultasi dokter spesialis, konsultasi psikologi, rekomendasi ijin praktek, pelayanan ambulan dan pelayanan mobil jenazah .
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Perhitungan tarif retribusi sebagai berikut :
- Tarif** = Jasa sarana + Jasa Pelayanan
- Jasa sarana** = BMHP + Sarana Medis + Sarana Non Medis
- Unit Cost BMHP = $\frac{\text{harga pembelian}}{\text{unit penggunaan}} \times \text{volume}$
- Sarana Medis** =
unit cost penggunaan sarana medis + unit cost pemeliharaan sarana medis
- Unit Cost penggunaan sarana medis =
 $\frac{\text{Dispreasi}}{\text{Tindakan}}$
- Depresiasi = $\frac{\text{Harga Pembelian alat}}{\text{Umur ekonomis}}$
- Unit cost pemeliharaan sarana medis =
 $\frac{\text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Tindakan}}$
- Sarana non medis** =
unit cost penggunaan sarana non medis + unit cost pemeliharaan sarana non medis
- Unit Cost penggunaan sarana non medis =
 $\frac{\text{Dispreasi}}{\text{Tindakan}}$
- Depresiasi = $\frac{\text{Harga Pembelian}}{\text{Umur ekonomis}}$
- Unit cost pemeliharaan sarana non medis =
 $\frac{\text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Tindakan}}$
- ayat (2) **Jasa Pelayanan** = $\frac{35\%}{65\%} \times \text{jasa sarana}$
- Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan pasien lanjut usia adalah pasien yang berumur 60 (enam puluh tahun) ke atas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : pelayanan ini termasuk pembebasan tarif retribusi pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
- ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada antara lain: Ketentuan Asuransi Kesehatan Sosial (Askesos) / Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan asuransi kesehatan lainnya.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Wajib Retribusi adalah masyarakat umum yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 6 Mei 2010

TARIF RETRIBUSI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|-----------|--|-------------|--------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| I | PENGOBATAN UMUM | 2,164 | 1,086 | 1,750 | 5,000 |
| II | PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM | | | | |
| A | PELAYANAN KLINIK UMUM | | | | |
| 1 | Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) | 35,296 | 1,754 | 19,950 | 57,000 |
| 2 | Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) | 5,551 | 1,599 | 3,850 | 11,000 |
| 3 | Pemasangan Botol infuse pertama | 37,308 | 1,692 | 21,000 | 60,000 |
| 4 | Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya | | 9,750 | 5,250 | 15,000 |
| 5 | Pemasangan Kateter | 22,629 | 3,371 | 14,000 | 40,000 |
| 6 | Pelepasan Kateter | 7,129 | 671 | 4,200 | 12,000 |
| 7 | Pemasangan Bidai | 11,093 | 607 | 6,300 | 18,000 |
| 8 | Pemasangan Gips | 55,900 | 1,300 | 30,800 | 88,000 |
| 9 | Pelepasan Gips | 1,033 | 4,167 | 2,800 | 8,000 |
| 10 | Pemberian Stesolid Suppositoria | 24,829 | 521 | 13,650 | 39,000 |
| 11 | Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS) | 23,941 | 2,709 | 14,350 | 41,000 |
| 12 | Penanganan Kasus Kegawatdaruratan | 10,646 | 2,354 | 7,000 | 20,000 |
| 13 | Penanganan Kasus dengan Injeksi | 4,867 | 983 | 3,150 | 9,000 |
| 14 | Penanganan Kasus dengan Nebulizer | 10,382 | 1,968 | 6,650 | 19,000 |
| | | | | | |
| B | PELAYANAN BEDAH | | | | |
| 1 | Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi | 24,262 | 1,738 | 14,000 | 40,000 |
| 2 | Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan | 17,995 | 1,505 | 10,500 | 30,000 |
| 3 | Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya | 798 | 502 | 700 | 2,000 |
| 4 | Tindakan Angkat Jahitan | 5,125 | 2,025 | 3,850 | 11,000 |
| 5 | Tindakan Ekstraksi Kuku | 11,513 | 1,487 | 7,000 | 20,000 |
| 6 | Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak | 48,519 | 17,131 | 35,350 | 101,000 |
| 7 | Tindakan Sirkumsisi | 44,174 | 53,326 | 52,500 | 150,000 |
| 8 | Tindakan Perawatan Luka Sederhana | 3,210 | 3,940 | 3,850 | 11,000 |
| 9 | Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit | 8,125 | 5,525 | 7,350 | 21,000 |
| 10 | Tindakan Perawatan Luka Bakar | 9,235 | 3,765 | 7,000 | 20,000 |

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|------------|---|-------------|--------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| C | PELAYANAN PENYAKIT MATA | | | | |
| | Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi | 8,146 | 8,104 | 8,750 | 25,000 |
| D | PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan) | | | | |
| 1 | Ekstraksi Cerumen Prop Telinga | 8,913 | 837 | 5,250 | 15,000 |
| 2 | Ekstraksi Corpus Alineum Telinga | 8,913 | 837 | 5,250 | 15,000 |
| 3 | Tindik Telinga Dewasa | 12,288 | 1,362 | 7,350 | 21,000 |
| E | PELAYANAN KLINIK IMS (Infeksi Menular Seksual) DAN NAPZA | | | | |
| 1 | Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual) | 12,130 | 5,420 | 9,450 | 27,000 |
| 2 | Terapi Methadon | 2,975 | 275 | 1,750 | 5,000 |
| 3 | Layanan Jarum Suntik Steril | 6,244 | 256 | 3,500 | 10,000 |
| F | LABORATORIUM | | | | |
| F.1 | Kimia Darah | | | | |
| 1 | Gula Darah | 4,129 | 3,996 | 4,375 | 12,500 |
| 2 | Cholesterol Total | 7,289 | 1,811 | 4,900 | 14,000 |
| 3 | Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein) | 5,695 | 4,705 | 5,600 | 16,000 |
| 4 | Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein) | 6,916 | 2,184 | 4,900 | 14,000 |
| 5 | Trigliserida | 8,371 | 2,679 | 5,950 | 17,000 |
| 6 | Asam urat | 6,599 | 2,501 | 4,900 | 14,000 |
| 7 | Ureum | 5,955 | 3,145 | 4,900 | 14,000 |
| 8 | Creatinin | 4,958 | 4,142 | 4,900 | 14,000 |
| 9 | SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) | 5,965 | 3,135 | 4,900 | 14,000 |
| 10 | SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) | 5,309 | 3,791 | 4,900 | 14,000 |
| F.2 | Hematologi | | | | |
| 1 | Darah Rutin | 7,484 | 3,891 | 6,125 | 17,500 |
| 2 | Haemoglobin | 2,985 | 265 | 1,750 | 5,000 |
| 3 | Angka Leukosit | 2,190 | 1,060 | 1,750 | 5,000 |
| 4 | Angka Eritrosit | 2,854 | 396 | 1,750 | 5,000 |
| 5 | Angka Trombosit | 2,254 | 996 | 1,750 | 5,000 |
| 6 | Hitung Jenis Leukosit | 4,508 | 42 | 2,450 | 7,000 |
| 7 | Retikulosit | 2,254 | 996 | 1,750 | 5,000 |

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|------------|--|-------------|--------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| 8 | Hematokrit | 3,154 | 1,396 | 2,450 | 7,000 |
| 9 | Laju Endap Darah | 3,131 | 119 | 1,750 | 5,000 |
| 10 | Clotting Time | 3,015 | 235 | 1,750 | 5,000 |
| 11 | Bleeding Time | 1,390 | 1,210 | 1,400 | 4,000 |
| 12 | Golongan Darah | 3,195 | 55 | 1,750 | 5,000 |
| 13 | Rhesus | 868 | 2,382 | 1,750 | 5,000 |
| 14 | Malaria | 4,508 | 692 | 2,800 | 8,000 |
| | | | | | |
| F.3 | Urinologi | | | | |
| 1 | Urin rutin | 4,445 | 755 | 2,800 | 8,000 |
| 2 | Reduksi Glukosa | 3,079 | 171 | 1,750 | 5,000 |
| 3 | Protein | 3,079 | 171 | 1,750 | 5,000 |
| 4 | Sedimen | 1,445 | 1,805 | 1,750 | 5,000 |
| 5 | Tes Kehamilan | 1125 | 3425 | 2450 | 7,000 |
| | | | | | |
| F4 | Lain Lain | | | | |
| 1 | Widal | 20,937 | 513 | 11,550 | 33,000 |
| 2 | HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | 70,095 | 755 | 38,150 | 109,000 |
| 3 | Gonorrhoea | 9,925 | 475 | 5,600 | 16,000 |
| 4 | VDRL (<i>Veneral Disease Research Laboratory</i>) | 8,959 | 141 | 4,900 | 14,000 |
| 5 | TPHA (<i>The Treponema Pallidum Haemagglutination</i>) | 17,859 | 341 | 9,800 | 28,000 |
| 6 | NAPZA (4 Parameter) | 32,830 | 19,170 | 28,000 | 80,000 |
| 7 | HbsAg | 14,179 | 121 | 7,700 | 22,000 |
| 8 | Anti HbsAg | 18,739 | 111 | 10,150 | 29,000 |
| 9 | Faeses Rutin | 2,734 | 516 | 1,750 | 5,000 |
| | | | | | |
| G | RADIOLOGI | | | | |
| 1 | Manus | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 2 | Wrist Joint | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 3 | Antebrachi | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 4 | Elbow Joint | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 5 | Humeri | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 6 | Shoulder Joint | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 7 | Clavicula | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|------------|---------------------------------------|-------------|--------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| 8 | Scapula | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 9 | Cranium 3 Posisi | 45,000 | 13,500 | 31,500 | 90,000 |
| 10 | Cranium 2 Posisi | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 11 | Thorax Dewasa | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 12 | Thorax Anak | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 13 | Abdomen | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 14 | Pelvis | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 60,000 |
| 15 | Cervical | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 60,000 |
| 16 | Thoracal | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 60,000 |
| 17 | Lumbal | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 60,000 |
| 18 | Lumbosacral | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 60,000 |
| 19 | Hip Joint | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 20 | Femur | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 21 | Knee Joint | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 22 | Cruris | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 23 | Ankle Joint | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| 24 | Pedis | 15,000 | 4,500 | 10,500 | 30,000 |
| | | | | | |
| H | ELEKTROMEDIK | | | | |
| 1 | Pengukuran BMI | 1,193 | 1,883 | 1,750 | 5,000 |
| 2 | Pengukuran Spirometer | 1,193 | 14,445 | 3,850 | 11,000 |
| 3 | Pengukuran Densitas tulang | 1,193 | 37,157 | 20,650 | 59,000 |
| 4 | Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) | 14,900 | 11,100 | 14,000 | 40,000 |
| 5 | Pemeriksaan CTG | 14,900 | 11,100 | 14,000 | 40,000 |
| 6 | Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) | 8,592 | 5,058 | 7,350 | 21,000 |
| 7 | Pemeriksaan Fetal Doppler | 1,125 | 3,425 | 2,450 | 7,000 |
| 8 | Fisioterapi | 5,645 | 20,355 | 14,000 | 40,000 |
| | | | | | |
| III | PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK | | | | |
| A | RAWAT JALAN | | | | |
| A.1 | Pelayanan Keluarga Berencana | | | | |
| 1 | Pelayanan Calon Penganten | 12,808 | 192 | 7,000 | 20,000 |
| 2 | Pemasangan IUD (Intra Uterine Device) | 35,000 | 4,000 | 21,000 | 60,000 |
| 3 | Kontrol IUD (Intra Uterine Device) | 7,431 | 1,019 | 4,550 | 13,000 |

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|------------|---|-------------|---------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| 4 | Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) | 7,416 | 1,034 | 4,550 | 13,000 |
| 5 | Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit | 14,877 | 10,473 | 13,650 | 39,000 |
| 6 | Pemasangan Susuk KB | 109,444 | 4,306 | 61,250 | 175,000 |
| 7 | Pelepasan Susuk KB | 19,444 | 3,956 | 12,600 | 36,000 |
| 8 | Suntik KB (Keluarga Berencana) | 8,000 | 450 | 4,550 | 13,000 |
| 9 | Pil KB (Keluarga Berencana) | 5,000 | 850 | 3,150 | 9,000 |
| | | | | | |
| A.2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | |
| 1 | Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin | 31 | 3,219 | 1,750 | 5,000 |
| 2 | Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket I (Trimester I) | 12,429 | 8,371 | 11,200 | 32,000 |
| 3 | Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Paket II (Trimester III) | 16,140 | 13,760 | 16,100 | 46,000 |
| 4 | Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler | 641 | 3,259 | 2,100 | 6,000 |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas | 3,608 | 942 | 2,450 | 7,000 |
| 6 | Pelayanan Kesehatan Neonatus | 5,169 | 31 | 2,800 | 8,000 |
| 7 | Pelayanan Kesehatan Bayi | 4,983 | 217 | 2,800 | 8,000 |
| | | | | | |
| A.3 | Lain Lain | | | | |
| 1 | Pengambilan Spesimen Pap Smear | 7,644 | 2,106 | 5,250 | 15,000 |
| 2 | Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat) | 4,200 | 2,300 | 3,500 | 10,000 |
| 3 | Tindik Telinga Bayi | 4,576 | 1,274 | 3,150 | 9,000 |
| | | | | | |
| B | RAWAT INAP | | | | |
| 1 | Partus Normal | 58,069 | 6,931 | 35,000 | 100,000 |
| 2 | Partus Dengan Perdarahan | 118,717 | 118,533 | 127,750 | 365,000 |
| 3 | Partus Dengan Pre Eklampsia Berat (PEB) | 100,417 | 12,033 | 60,550 | 173,000 |
| 4 | Partus Dengan Induksi | 77,285 | 9,165 | 46,550 | 133,000 |
| 5 | Partus Dengan Stimulasi | 77,910 | 9,190 | 46,900 | 134,000 |
| 6 | Partus Dengan Kelainan Presentasi | 62,754 | 50,996 | 61,250 | 175,000 |
| 7 | Partus Dengan Vakum Ekstraksi | 64,476 | 119,474 | 99,050 | 283,000 |
| 8 | Partus Gemelli / Kembar | 65,064 | 64,936 | 70,000 | 200,000 |
| 9 | Jahitan Perineum | 32,546 | 3,854 | 19,600 | 56,000 |
| 10 | Jahitan Portio | 39,511 | 4,689 | 23,800 | 68,000 |
| 11 | Oksigenasi 30 Menit Pertama | 9,000 | 2,700 | 6,300 | 18,000 |

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|-----------|---|-------------|--------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| 12 | Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya | 3,000 | 250 | 1,750 | 5,000 |
| 13 | Evakuasi Plasenta Manual | 50,111 | 5,789 | 30,100 | 86,000 |
| 14 | Eksplorasi | 29,026 | 3,474 | 17,500 | 50,000 |
| 15 | Kuretase | 50,498 | 92,502 | 77,000 | 220,000 |
| 18 | Perawatan Hiperemesis | 52,169 | 6,331 | 31,500 | 90,000 |
| 19 | Abortus Imminens | 37,074 | 4,526 | 22,400 | 64,000 |
| 20 | Abortus Incompletus | 35,602 | 4,048 | 21,350 | 61,000 |
| 21 | Perawatan Partus Prematurus Imminens | 48,167 | 5,783 | 29,050 | 83,000 |
| 22 | Asfiksia | 161,943 | 20,057 | 98,000 | 280,000 |
| 23 | Perawatan BBN (Berat Bayi Normal) | 9,335 | 415 | 5,250 | 15,000 |
| 24 | Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) | 15,424 | 176 | 8,400 | 24,000 |
| 25 | Perawatan Ibu Nifas Normal | 10,102 | 6,148 | 8,750 | 25,000 |
| 26 | Perawatan Ibu Nifas Dengan Penyulit | 107,898 | 13,002 | 65,100 | 186,000 |
| 27 | Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal) / Hari | 30,000 | 9,000 | 21,000 | 60,000 |
| 28 | Paket Rawat Inap Ibu (Kelas) / Hari | 45,000 | 7,000 | 28,000 | 80,000 |
| 29 | Paket Rawat Inap Bayi (Bangsal) / Hari | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 20,000 |
| 30 | Paket Rawat Inap Bayi (Kelas) / Hari | 15,000 | 11,000 | 14,000 | 40,000 |
| 31 | Visite | 0 | 3,250 | 1,750 | 5,000 |
| | | | | | |
| IV | PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT | | | | |
| | | | | | |
| A | TINDAKAN PREFENTIF | | | | |
| 1 | Pembersihan Karang Gigi (<i>Manual Scalling</i>) Satu Regio | 3,766 | 4,684 | 4,550 | 13,000 |
| 2 | Pembersihan Karang Gigi (<i>Ultra Sonic Scaller</i>) Satu Regio | 4,282 | 8,718 | 7,000 | 20,000 |
| 3 | Perawatan Topikal Aplikasi Fluor | 15,150 | 4,350 | 10,500 | 30,000 |
| 4 | Perawatan Fissure Sealant | 8,564 | 4,436 | 7,000 | 20,000 |
| 5 | Perawatan Kaping Pulpa | 9,286 | 4,364 | 7,350 | 21,000 |
| | | | | | |
| B. | PENAMBALAN | | | | |
| 1 | Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I) | 5,254 | 3,846 | 4,900 | 14,000 |
| 2 | Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II) | 7,824 | 5,826 | 7,350 | 21,000 |
| 3 | Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III) | 5,931 | 4,469 | 5,600 | 16,000 |
| 4 | Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan | 6,072 | 13,428 | 10,500 | 30,000 |
| 5 | Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan | 23,090 | 3,560 | 14,350 | 41,000 |

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|-----------|--|-------------|--------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| 6 | Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan | 30,108 | 3,692 | 18,200 | 52,000 |
| 7 | Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan | 17,402 | 7,298 | 13,300 | 38,000 |
| 8 | Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan | 24,950 | 8,200 | 17,850 | 51,000 |
| 9 | Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan | 36,884 | 11,866 | 26,250 | 75,000 |
| | | | | | |
| C. | TINDAKAN PENCABUTAN | | | | |
| 1 | Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE) | 5,715 | 460 | 3,325 | 9,500 |
| 2 | Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit) | 6,809 | 1,641 | 4,550 | 13,000 |
| 3 | Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit | 13,528 | 7,922 | 11,550 | 33,000 |
| 4 | Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit) | 11,259 | 8,241 | 10,500 | 30,000 |
| 5 | Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit) | 21,928 | 9,922 | 17,150 | 49,000 |
| | | | | | |
| D | TINDAKAN BEDAH MULUT SEDERHANA | | | | |
| 1 | Operculectomy | 7,299 | 5,051 | 6,650 | 19,000 |
| 2 | Trepanasi Gigi Gangren | 4,156 | 4,294 | 4,550 | 13,000 |
| 3 | Perawatan Incisi Abses | 6,349 | 4,051 | 5,600 | 16,000 |
| 4 | Perawatan Eksisi Mukokel | 17,319 | 4,131 | 11,550 | 33,000 |
| 5 | Perawatan Dry Socket | 7,215 | 4,485 | 6,300 | 18,000 |
| 6 | Buka Jahitan Operasi | 2,311 | 4,839 | 3,850 | 11,000 |
| 7 | Operasi Odontectomy | 94,521 | 11,429 | 57,050 | 163,000 |
| 8 | Selektif Grinding | 4,878 | 2,922 | 4,200 | 12,000 |
| | | | | | |
| E | TINDAKAN LAIN LAIN | | | | |
| | Bongkar Protosa | 10,111 | 2,239 | 6,650 | 19,000 |
| | | | | | |
| V | PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN | | | | |
| 1 | Pelayanan Perawatan Rumah (<i>Home Care</i>) | 6,155 | 10,095 | 8,750 | 25,000 |
| 2 | Keur Dokter | 0 | 4,550 | 2,450 | 7,000 |
| 3 | Pemeriksaan Buta Warna | 0 | 4,550 | 2,450 | 7,000 |
| 4 | Visum Luar | | | | |
| | a. Dalam Gedung | 1,725 | 4,125 | 3,150 | 9,000 |
| | b. Luar Gedung | 6,225 | 3,525 | 5,250 | 15,000 |
| 5 | Konsultasi Kesehatan lainnya | 0 | 4,550 | 2,450 | 7,000 |
| 6 | Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi | 570 | 3,980 | 2,450 | 7,000 |

| NO | PELAYANAN | JASA SARANA | | JASA PELAYANAN | TARIF (Rp) |
|----|--------------------------------|-------------|--------|----------------|------------|
| | | BMHP | SARANA | | |
| 7 | Konsultasi Dokter Spesialis | 570 | 7,555 | 4,375 | 12,500 |
| 8 | Konsultasi Psikologi | 0 | 4,550 | 2,450 | 7,000 |
| 9 | Pelayanan Ambulans | | | | |
| | a. Sampai dengan 10 Km | 0 | 23,400 | 12,600 | 36,000 |
| | b. Setiap kilometer berikutnya | 0 | 2,340 | 1,260 | 3,600 |
| 10 | Pelayanan Mobil Jenazah | | | | |
| | a. Sampai dengan 10 Km | 0 | 23,400 | 12,600 | 36,000 |
| | b. Setiap kilometer berikutnya | | 2,340 | 1,260 | 3,600 |
| 11 | Pelayanan Vaksin anti Rabies | 4,867 | 8,133 | 7,000 | 20,000 |
| 12 | Serum anti bisa ular | 4,867 | 8,133 | 7,000 | 20,000 |
| 13 | Pelayanan segel jenazah | 960 | 31,540 | 17,500 | 50,000 |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO